

Pemdes Mata Baho Salurkan BLT Dana Desa untuk 24 Lansia, Tiap Penerima Dapat Rp1,2 Juta

Konkep, Sultranet.com - Pemerintah Desa Mata Baho, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2026 kepada 24 warga lanjut usia (lansia) yang telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan tersebut diberikan untuk periode enam bulan dengan nilai Rp200 ribu per bulan bagi setiap penerima, Senin (25/5/2026).

Kepala Desa Mata Baho, Anas Arhum, mengatakan penyaluran BLT Dana Desa ini merupakan bentuk komitmen pemerintah desa dalam membantu masyarakat rentan, khususnya lansia yang memiliki keterbatasan ekonomi dan tidak lagi memiliki penghasilan tetap.

Ia menjelaskan, setiap penerima akan memperoleh total bantuan sebesar Rp1,2 juta selama enam bulan penyaluran. Sementara total anggaran yang dialokasikan pemerintah desa untuk program tersebut mencapai sekitar Rp28 juta.

“Program BLT Dana Desa ini kami prioritaskan bagi warga lansia yang benar-benar membutuhkan. Setiap penerima mendapatkan Rp200 ribu per bulan selama enam bulan. Kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat,” kata Anas Arhum.

Menurutnya, penetapan penerima bantuan dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan perangkat desa dan unsur masyarakat agar prosesnya berjalan transparan dan tepat sasaran.

Selain itu, kata dia, pemerintah desa juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga sebelum menetapkan daftar penerima manfaat. Lansia menjadi prioritas utama karena dinilai paling rentan terhadap tekanan ekonomi sehari-hari.

“Kami ingin memastikan bantuan ini diterima warga yang memang layak menerima. Karena itu seluruh proses pendataan dan penetapan dilakukan secara

terbuka bersama masyarakat,” ujarnya.

Anas juga berharap bantuan tersebut dapat digunakan secara bijak oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli bahan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan penting lainnya.

Ia menambahkan, pemerintah desa akan terus berupaya menjalankan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga transparansi pengelolaan anggaran desa.

“Kami berkomitmen menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap program pembangunan desa,” tambahnya.

Salah seorang penerima manfaat mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah desa. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk membeli kebutuhan pokok dan obat-obatan.

Proses penyaluran bantuan berlangsung tertib dan lancar dengan pengawasan perangkat desa serta pendamping desa guna memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pewarta: Aldi Dermawan

Lamoluo Turut Meriahkan Expo Desa di Konkep, Usung Slogan “Jagonya Pisang”

SULTRANET.COM, KONKEP - Desa Lamoluo, Kecamatan Wawonii Barat, turut ambil bagian dalam ajang Expo Desa se-Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang digelar di Alun-alun Kota Langara. Kehadiran stan Desa Lamoluo menjadi salah satu yang paling menarik perhatian pengunjung berkat slogan khas yang diusung, yakni “Jagonya Pisang”. Sabtu (23/5)

Dalam kegiatan yang diikuti desa-desa se-Konkep itu, Desa Lamoluo tampil menonjol dengan memamerkan berbagai produk olahan berbahan dasar pisang, yang selama ini dikenal sebagai salah satu komoditas unggulan masyarakat Pulau Wawonii.

Stan Desa Lamoluo tampak ramai dikunjungi masyarakat maupun tamu undangan yang penasaran dengan aneka produk olahan pisang yang dipamerkan. Mulai dari pisang ijo, keripik pisang berbagai rasa, hingga aneka inovasi kuliner berbahan dasar pisang lainnya tersaji di stan tersebut.

Pramuniaga stan Desa Lamoluo, Evi Sardani, mengatakan slogan “Jagonya Pisang” dipilih sebagai bentuk identitas sekaligus kebanggaan masyarakat desa terhadap potensi lokal yang dimiliki.

“Kami ingin memeriahkan expo ini dengan membawa ciri khas desa kami. Pisang merupakan salah satu komoditas unggulan masyarakat Pulau Wawonii, sehingga kami hadir dengan berbagai produk olahan yang menjadi kebanggaan warga,” ujar Evi.

Menurutnya, partisipasi dalam expo desa tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan produk UMKM desa kepada masyarakat luas sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih besar.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap produk-produk olahan pisang dari Desa Lamoluo bisa semakin dikenal dan diminati masyarakat,” katanya.

Kehadiran Desa Lamoluo juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Desa yang dipimpin Kepala Desa Irda Sahwida itu dinilai berhasil menghadirkan konsep promosi desa yang kreatif dengan mengangkat satu komoditas unggulan secara konsisten.

Antusiasme pengunjung pun terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Sejumlah warga mengaku sengaja datang ke stan Lamoluo karena penasaran dengan cita rasa produk olahan pisang yang sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat.

“Memang sudah terkenal kalau olahan pisang dari dapur Evi Sardani rasanya enak. Jadi kami sengaja mampir untuk beli dan mencoba lagi,” ujar salah seorang pengunjung.

Melalui keikutsertaan dalam Expo Desa se-Konkep tersebut, Pemerintah Desa

Lamoluo berharap semangat pengembangan ekonomi desa terus tumbuh, khususnya dalam mendukung pelaku usaha lokal berbasis potensi daerah.

Selain menjadi ajang promosi, kegiatan itu juga diharapkan mampu memperluas jaringan pemasaran produk UMKM desa dan semakin memperkenalkan Desa Lamoluo sebagai salah satu sentra olahan pisang di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pewarta: Aldi Dermawan

Pemdes Mawa Salurkan BLT Dana Desa 2026 untuk 10 KPM, Warga Terima Rp1,8 Juta

SULTRANET.COM, KONKEP - Pemerintah Desa (Pemdes) Mawa, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2026 kepada 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Rabu (20/5/2026).

Penyaluran bantuan dilakukan di kantor desa setempat dan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa, perangkat desa, serta unsur terkait lainnya.

Kepala Desa Mawa, Sarman, mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan alokasi BLT Dana Desa untuk periode Januari hingga Juni 2026. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan atau total Rp1,8 juta selama enam bulan.

Menurut Sarman, penetapan penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan musyawarah desa dengan mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 16

Tahun 2025 serta data Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga Sasaran (P3KE).

“Penerima bantuan ini diprioritaskan bagi warga miskin ekstrem, lanjut usia, dan penyandang disabilitas,” kata Sarman.

Ia menegaskan, seluruh penerima dipastikan tidak terdaftar dalam program bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

“Kami ingin bantuan ini diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan belum mendapatkan bantuan sosial lainnya,” ujarnya.

Sarman juga memastikan proses penyaluran dilakukan secara terbuka dan transparan agar masyarakat dapat mengetahui langsung mekanisme penyaluran bantuan.

“Seluruh proses dilakukan secara terbuka dengan melibatkan unsur BPD, Babinsa, dan pihak terkait lainnya sebagai bentuk transparansi pemerintah desa,” tambahnya.

Salah seorang penerima manfaat mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia menyebut bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu. Uangnya langsung saya gunakan untuk membeli beras dan obat-obatan,” ungkapnya.

Pemdes Mawa menegaskan bahwa seluruh tahapan penyaluran BLT Dana Desa telah dilaksanakan secara akuntabel dan dilengkapi dokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa.

Laporan: Aldi Dermawan

Suryadi Tinjau Langsung Pemukiman Warga Terdampak Banjir di Desa Rakadua

Bombana, sultranet.com - Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Suryadi, meninjau langsung pemukiman warga yang terdampak banjir di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Selasa (12/5/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan di sela kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang dilaksanakannya di Kecamatan Poleang dan Kecamatan Poleang Barat sejak 11 hingga 16 Mei 2026. Kehadiran Suryadi di lokasi banjir merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir.

Saat berada di lokasi, Suryadi menyempatkan diri berdialog dan mendengarkan langsung keluhan warga terkait kondisi pemukiman yang terendam air. Sejumlah warga mengeluhkan buruknya saluran drainase yang dinilai belum mampu menampung debit air saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

Menurut Suryadi, banjir yang terjadi dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan serta kondisi drainase yang belum optimal sehingga menyebabkan air meluap ke area pemukiman warga.

“Persoalan ini perlu segera mendapatkan perhatian bersama agar masyarakat tidak terus-menerus terdampak ketika musim hujan tiba,” ujar Politisi Partai Gerindra itu saat meninjau lokasi banjir.

Pada sore harinya, Suryadi kembali melakukan peninjauan bersama pihak Balai Pekerjaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Desa Rakadua, staf Kecamatan Poleang Barat, serta sejumlah tokoh masyarakat. Peninjauan lanjutan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi aliran drainase dan titik-titik yang menjadi penyebab genangan air.

Ia berharap adanya langkah penanganan yang cepat dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat guna meminimalisasi dampak banjir di wilayah tersebut.

Selain meninjau kondisi pemukiman, Suryadi juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di daerah rawan genangan dan bantaran saluran air. (JS)

Danguskamla Koarmada II Pimpin Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 di Wakatobi, Perkuat Kedaulatan dan Motivasi Generasi Muda

Wakatobi, Sultranet.com - Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Koarmada II, Laksma TNI, Edy Setyawan, SE, memimpin langsung rangkaian kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) Tahun 2026 di Kabupaten Wakatobi sebagai bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam memperkuat kedaulatan negara di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T), khususnya di Pulau Binongko, Tomia, dan Kaledupa, yang berlangsung pada 9-10 Mei 2026.

Program Ekspedisi Rupiah Berdaulat menjadi salah satu langkah strategis negara dalam memastikan masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan akses terhadap uang Rupiah layak edar sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh layanan penukaran uang Rupiah layak edar, tetapi juga edukasi terkait gerakan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah yang terus digaungkan Bank Indonesia bersama TNI AL di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah kepulauan dan perbatasan.

Pada Sabtu, 9 Mei 2026, Danguskamla Koarmada II menghadiri malam ramah tamah Ekspedisi Rupiah Berdaulat yang digelar di Blue Ocean View Resort and Caffe Dapoer Maritim, Wakatobi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Wakatobi, Haliana, Wakil Bupati Wakatobi, Sawia Fualo, Kepala Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Wakatobi.

Kegiatan kemudian berlanjut pada Minggu, 10 Mei 2026, dengan berbagai agenda sosial dan olahraga bersama masyarakat di Kecamatan Wangi-Wangi. Rangkaian kegiatan meliputi Wakatobi Biosfer Run, senam bersama, pengobatan gratis, khitanan massal, pembagian sembako, layanan penukaran uang Rupiah layak edar, hingga sosialisasi gerakan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah.

Kehadiran program tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat karena dinilai memberikan manfaat langsung, khususnya bagi warga di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan dan kesehatan.

Di sela pelaksanaan kegiatan, Laksamana Pertama TNI Edy Setyawan bersama prajurit KRI Pulau Rimau-724 juga melaksanakan sosialisasi rekrutmen Prajurit TNI Angkatan Laut di SMA Negeri 1 Wangi-Wangi yang diikuti sekitar 100 pelajar.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa diberikan pemahaman mengenai peluang bergabung menjadi prajurit TNI AL serta pentingnya membangun karakter disiplin, tangguh, dan berintegritas sejak dini.

Edy Setyawan menegaskan generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga masa depan bangsa dan kedaulatan maritim Indonesia. Karena itu, ia mengajak para pelajar untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh dan menjauhi perilaku negatif yang dapat merusak masa depan.

“Generasi muda Wakatobi harus berani bermimpi, siap mengabdikan kepada bangsa dan negara, serta menjadi bagian dari prajurit TNI AL yang profesional, modern, dan tangguh dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia,” ujar Edy Setyawan. (10/5)

Ia juga mengingatkan para pelajar agar menjauhi penyalahgunaan narkoba dan pergaulan negatif yang dapat menghambat masa depan mereka. Menurutnya, kedisiplinan dan semangat belajar menjadi modal utama bagi generasi muda untuk meraih cita-cita.

Selain memperkenalkan profil TNI Angkatan Laut, sosialisasi tersebut juga

menjelaskan mekanisme penerimaan prajurit melalui slogan “Join The Navy To See The World” yang bertujuan memotivasi pelajar agar memiliki wawasan luas dan semangat mengabdikan kepada negara.

Program Ekspedisi Rupiah Berdaulat sendiri menjadi simbol kolaborasi nyata antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah kepulauan Indonesia.

Melalui pendekatan sosial, edukatif, dan pelayanan langsung kepada masyarakat, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat sekaligus memperkuat pemahaman tentang pentingnya Rupiah sebagai alat pemersatu bangsa dan simbol kedaulatan negara.

Pewartanya: Samidin

Ketua Pansus DPRD Muna Minta Maaf ke HMI, Tegaskan Status WhatsApp Tak Ditujukan Secara Khusus

MUNA, Sultranet.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Muna, Ramsin, akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Raha terkait polemik unggahan status WhatsApp pribadinya yang sempat memicu sorotan publik. Ramsin menegaskan, unggahan tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk menyindir ataupun merendahkan organisasi tertentu, termasuk HMI Cabang Raha, Rabu (6/5/2026).

Politisi Fraksi Demokrat itu menjelaskan, status WhatsApp yang menjadi perbincangan publik tersebut merupakan bentuk luapan emosi pribadi yang dituangkan melalui kalimat kiasan. Ia menilai unggahan itu tidak memiliki tujuan

untuk menyerang pihak tertentu sebagaimana yang berkembang di tengah masyarakat.

Ramsin mengaku situasi tersebut bermula setelah dirinya menjalani sejumlah agenda padat, mulai dari audiensi hingga rapat dinas. Dalam perjalanan pulang, ia merasa berada dalam kondisi yang tidak nyaman karena menduga diikuti oleh beberapa orang yang mengendarai tiga unit sepeda motor di kawasan Laiworu.

Karena merasa tidak aman, Ramsin memilih berhenti di sebuah warung untuk memastikan situasi di sekitarnya. Dalam kondisi tersebut, ia sempat mencoba menghubungi pihak kepolisian sebelum akhirnya orang-orang yang diduga mengikutinya meninggalkan lokasi.

“Secara pribadi saya tidak pernah punya niat untuk menyinggung siapa pun. Story itu bersifat privat dan hanya saya yang memahami konteksnya. Sindiran itu bersifat umum, bukan ditujukan kepada HMI Cabang Raha,” kata Ramsin saat memberikan klarifikasi.

Ia menegaskan, dirinya menghormati seluruh organisasi kemahasiswaan dan tidak memiliki persoalan pribadi dengan HMI Cabang Raha maupun kelompok masyarakat lainnya.

“Untuk itu saya secara pribadi meminta maaf. Tidak ada niat saya untuk menyinggung ataupun merendahkan siapapun termasuk organisasi HMI,” ujarnya.

Permohonan maaf tersebut disampaikan Ramsin sebagai bentuk itikad baik agar polemik yang berkembang tidak semakin meluas dan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia berharap persoalan tersebut dapat disikapi secara bijaksana serta tidak memicu ketegangan antar pihak.

Selain menyampaikan klarifikasi, Ramsin juga menyoroti sejumlah pemberitaan yang menurutnya terlalu cepat membangun opini tanpa melakukan konfirmasi langsung kepada dirinya sebagai pihak yang bersangkutan. Menurutnya, konfirmasi merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan informasi agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh dan objektif.

“Kita semua tentu berharap ruang publik tetap sehat. Saya menyayangkan jika ada narasi yang berkembang tanpa terlebih dahulu meminta penjelasan langsung

kepada saya," tuturnya.

Ia menambahkan, sebagai kader Partai Demokrat dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga sikap dan perilaku agar tetap kondusif di tengah masyarakat. Ramsin menegaskan komitmennya untuk menjaga nama baik partai dan menghindari berbagai bentuk kegaduhan yang dapat memengaruhi citra organisasi politik yang menaunginya.

Menurut Ramsin, dinamika yang muncul akibat unggahan di media sosial seharusnya menjadi pelajaran bersama agar setiap pihak lebih berhati-hati dalam menafsirkan suatu pernyataan, terlebih di ruang digital yang sangat mudah memunculkan persepsi berbeda di tengah publik.

Ia juga berharap hubungan antara DPRD, organisasi kemahasiswaan, dan masyarakat tetap berjalan harmonis demi menjaga stabilitas daerah serta menciptakan ruang dialog yang sehat dalam menyikapi berbagai persoalan sosial maupun politik di Kabupaten Muna.

Polemik status WhatsApp tersebut sebelumnya sempat memicu perhatian publik dan menuai beragam tanggapan di media sosial. Namun melalui klarifikasi dan permohonan maaf yang disampaikan secara terbuka, Ramsin berharap persoalan itu dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa memperpanjang kesalahpahaman.

Sebagai Ketua Pansus DPRD Kabupaten Muna, Ramsin menegaskan dirinya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat selama disampaikan dalam koridor yang santun dan konstruktif.

Penulis: Borju

Bombana Raih Peringkat IV Penanganan Stunting di Sultra,

Burhanuddin Tegaskan Komitmen Perkuat Program Kesehatan

KOLAKA, Sultranet.com - Kabupaten Bombana kembali mencatatkan capaian membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara setelah berhasil meraih penghargaan sebagai peringkat IV dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M kepada Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 di Hotel Sutan Raja Kolaka, Selasa (5/5/2026).

Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat langkah-langkah penanganan stunting melalui pendekatan lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Capaian tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen daerah dalam mendukung program nasional percepatan penurunan angka stunting demi menciptakan generasi sehat dan berkualitas di masa mendatang.

Bupati Bombana, Burhanuddin menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih daerahnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga masyarakat yang terus mendukung program pencegahan stunting di Bombana.

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat upaya penanganan stunting di Kabupaten Bombana. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen,” ujar Burhanuddin usai menerima penghargaan.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus meningkatkan kualitas intervensi terhadap penanganan stunting, baik melalui sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, hingga penguatan ketahanan pangan masyarakat.

Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa ditangani secara parsial karena berkaitan erat dengan pola hidup, pemenuhan gizi, lingkungan sehat, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah agar program percepatan penurunan stunting berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Penanganan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan seluruh stakeholder,” katanya.

Selain menerima penghargaan penanganan stunting, Bupati Bombana juga menghadiri rangkaian Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 bersama seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tenggara.

Forum tersebut menjadi ruang strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin kembali menegaskan pentingnya pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat agar program yang disusun benar-benar memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga.

“Perencanaan pembangunan harus berbasis data dan kondisi riil sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program pembangunan antarlevel pemerintahan guna menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

Dalam forum Musrenbang tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana sendiri terus mendorong sejumlah program prioritas, terutama di sektor pertanian, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan Bombana meraih peringkat IV penanganan stunting di Sulawesi Tenggara dinilai menjadi indikator positif atas keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak.

Pemerintah daerah berharap capaian tersebut dapat menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan di seluruh wilayah Bombana.

Dengan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, Kabupaten Bombana optimistis mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, unggul, dan berdaya saing di masa depan.

Layanan Kesehatan di Puskesmas Lansilowo Konkep Dikeluhkan

Konkep, sultranet.com - Pelayanan kesehatan di Puskesmas Lansilowo, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara, dikeluhkan warga. Sejumlah pasien mengaku tidak mendapatkan pelayanan optimal, bahkan harus pulang tanpa penanganan setelah menunggu berjam-jam, Senin (4/5/2026).

Keluhan itu salah satunya disampaikan seorang warga yang datang untuk berobat sejak pagi hari. Ia berharap bisa mendapatkan pemeriksaan medis, namun hingga menjelang siang, pelayanan belum juga diterima karena dokter tidak berada di tempat.

“Kami datang sejak awal jam pelayanan dibuka, tapi harus menunggu lama karena dokter tidak masuk. Setelah berjam-jam menunggu, kami akhirnya pulang sekitar pukul 12.00 tanpa diperiksa,” ujarnya, meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi. Ia menilai pelayanan di Puskesmas Lansilowo kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama

terkait kehadiran tenaga medis dan lamanya waktu tunggu pasien.

Pantauan di lokasi menunjukkan antrean pasien yang cukup panjang di ruang tunggu. Sejumlah warga, termasuk lansia dan anak-anak, terlihat harus menunggu dalam waktu lama tanpa kepastian kapan akan dilayani.

Selain persoalan tenaga medis, warga juga menyoroti keterbatasan fasilitas. Ruang pelayanan dinilai sempit, sementara ketersediaan obat-obatan tidak selalu mencukupi kebutuhan pasien.

“Kadang obat yang dibutuhkan tidak tersedia, jadi kami harus cari sendiri di luar,” kata warga lainnya.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait pengelolaan layanan kesehatan di daerah itu. Padahal, setiap tahun anggaran kesehatan terus dialokasikan melalui APBD maupun sumber lain, termasuk untuk operasional puskesmas.

Seorang pengamat kebijakan publik menilai persoalan ini mencerminkan lemahnya tata kelola pelayanan. Menurut dia, pelayanan publik yang tidak berjalan optimal biasanya berkaitan dengan perencanaan yang kurang matang, pengawasan yang lemah, serta minimnya akuntabilitas.

“Pelayanan itu satu kesatuan sistem. Kalau ada bagian yang tidak berjalan, maka seluruh rantai akan terdampak. Ini perlu evaluasi menyeluruh, baik dari sisi manajemen maupun pengawasan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Lansilowo, Irma Naura, S.Frm, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan.

Buruknya pelayanan di Puskesmas Lansilowo ini menjadi ironi di tengah capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Konawe Kepulauan yang masih berada pada kategori C- dengan nilai 2,35 berdasarkan evaluasi Kementerian PAN-RB RI pada Januari 2026.

Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan, guna memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak, cepat, dan merata.

Pewarta: Aldi Dermawan

Sespimma Polri Angkatan 75 Gelar KKP di Jabar, Perkuat Sinergi Polri-Pemda untuk Produktivitas Jagung dan Ketahanan Pangan

Bandung, sultranet.com - Peserta didik Sespimma Polri Angkatan ke-75 Tahun Anggaran 2026 melaksanakan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (4/5/2026).

Kegiatan yang digelar Kelompok Kerja (Pokjar) V tersebut berlangsung di Aula Soejoed dengan mengusung tema “Mewujudkan Sinergisitas Polri dengan Instansi Terkait Guna Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif.” Sebanyak 25 peserta didik mengikuti kegiatan ini.

KKP dipimpin Ketua Pelaksana sekaligus Tim Supervisi Kombes Pol Tommy Bambang Irawan, di bawah pengawasan Kombes Pol Didit Eko Herwanto, serta didampingi pembimbing AKBP Dewi Susilo Pangestuti dan Kompol Dedi Hermawan.

Kegiatan diisi dengan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas optimalisasi kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat dalam meningkatkan produktivitas jagung guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Ir. Dadan Hidayat, menjelaskan bahwa jagung memiliki peran strategis sebagai komoditas pangan, pakan ternak, hingga energi. Ia menekankan pentingnya stabilisasi pasokan untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar serta menekan fluktuasi harga.

Dalam forum tersebut juga ditegaskan peran aktif Polri dalam mengawal

distribusi jagung, baik kepada pelaku usaha pakan maupun ke Perum Bulog. Pengawasan mencakup pencegahan penimbunan, distribusi ilegal, hingga potensi penyimpangan dalam rantai pasok.

Hasil FGD menunjukkan adanya penguatan sinergi antara Polri dan pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kolaborasi lintas sektoral juga diperkuat melalui integrasi rantai pasok dari hulu hingga hilir dengan melibatkan pelaku usaha dan lembaga keuangan.

Pada aspek pembiayaan, petani didorong mengakses permodalan melalui perbankan, baik pemerintah maupun swasta, guna mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

Melalui optimalisasi kerja sama tersebut, produktivitas jagung diharapkan meningkat signifikan, distribusi menjadi lebih efisien, serta ketahanan pangan nasional semakin kuat dan berkelanjutan.

Pewarta: Samidin

Gemilang! Konkep Puncaki IPKD Sultra, Bukti Tata Kelola Keuangan Makin Berkualitas

SULTRANET.COM, KONKEP - Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat pertama Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tingkat Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, yang diumumkan oleh Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri RI), Kamis (23/04/2026).

Capaian ini menegaskan bahwa tata kelola keuangan daerah di Konkep berjalan di jalur yang tepat, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas

penggunaan anggaran yang berdampak langsung pada pembangunan.

IPKD sendiri merupakan indikator penting yang mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Posisi puncak yang diraih Konkep mencerminkan konsistensi dan disiplin dalam mengelola anggaran secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penilaian tim IPKD, lima daerah dengan capaian tertinggi di Sulawesi Tenggara yakni Konawe Kepulauan dengan skor 79,161, disusul Konawe Utara (76,647), Buton (75,208), Buton Selatan (74,981), dan Bombana (74,533).

Prestasi ini sekaligus menempatkan Konkep sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di wilayah tersebut. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kepemimpinan Bupati Konkep Rifqi Saifullah Razak bersama Wakil Bupati Muhamad Farid, yang dinilai mampu mendorong sistem pemerintahan berjalan efektif dan terarah.

Di sisi teknis, peran Kepala Badan Keuangan Daerah Konkep, Mahmud, juga dinilai signifikan dalam menghadirkan pembenahan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern, efisien, dan minim risiko penyimpangan.

Mahmud menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus menjaga sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi anggaran.

“Capaian ini tentunya tidak lepas dari dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Konkep, serta sinergitas seluruh perangkat daerah sehingga perencanaan dan realisasi anggaran berjalan lebih selaras,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan sistem dilakukan melalui digitalisasi pengelolaan keuangan, peningkatan pengawasan internal, serta optimalisasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran.

“Dampaknya tidak hanya terlihat pada capaian administratif, tetapi juga pada meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Keuangan daerah tidak lagi sekadar dikelola, tetapi benar-benar dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan berkomitmen mempertahankan capaian tersebut sekaligus terus berinovasi guna menjaga

standar tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan: Aldi Dermawan